

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI SELASA, 11 JUNI 2024



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

@lenteratoday

@lenteratoday

lentera.tv

Lentera TV Media

SETERU KPK-HASTO DI PUSARAN PELARIAN MASIKU

HP dan Tas Disita, Ditinggal Kedinginan di Ruang Pemeriksaan

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi buah bibir di Juni ini. Usai dipanggil Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6/2024) soal kasus dugaan tindak pidana penghasutan, Senin (19/6/2024) giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya. Di komisi antirasuah, Hasto dicecar terkait kasus suap Harun Masiku yang saat ini masih buronan. Seteru pun muncul, karena beberapa barang Hasto disita KPK usai pemeriksaan 4 jam tersebut. Handphone (HP) dan tasnya disita penyidik. Dia pun mengeluhkan sekitar 2,5 jam ditinggal kedinginan dan sendirian di ruang pemeriksaan. Tim kuasa hukumnya akan melaporkan penyidik KPK yang melakukan penyitaan ke Dewan Pengawas (Dewas). KPK sendiri bersikukuh setiap proses pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan mekanisme yang ada. Saat kegaduhan terkait kasus suap KPU ini masih berlanjut di tanah air, untuk diketahui si tersangka Harun Masiku sudah dalam pelarian hampir 4 tahun.

Baca di hal 11...

KRONOLOGI KASUS HARUN MASIKU



*** 10 JUNI 2024**
Hasto diperiksa KPK selama 4 jam. Handphone dan tasnya disita.



7 Agustus 2023
Krishna Murti kembali mengabarkan bahwa Harun Masiku bersembunyi di dalam negeri meski sempat ke luar negeri. Dugaan tersebut dilihat dari data pelintasan yang dilakukan oleh Harun Masiku.



26 Juli 2023
Ada informasi Harun Masiku berada di Kamboja. Kepala Divhubinter Polri Irjen Krishna Murti menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan KPK, interpol dan otoritas Kamboja dalam menindaklanjuti informasi tersebut.



Juli 2021
Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), namun tim gagal menangkap lantaran mengalami bermacam kendala.



*** 29 Januari 2020**
Harun Masiku masuk daftar buronan KPK.

Lanjut
di Hal 11...



*** 9 Januari 2020**
Hasto muncul di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat setelah namanya tak disebut KPK dalam pengumuman hasil operasi tangkap tangan.

**Government (Hal.2)
Aplikasi Cina 'Temu':
Ancam UMKM RI,
Lebih Berbahaya
Dibanding TikTok**



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

BURONAN

**HARUN
MASIKU**

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/6/2024), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. (1st/diolah)

Aplikasi Cina 'Temu': Ancam UMKM RI, Lebih Berbahaya Dibanding TikTok

JAKARTA- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan ada aplikasi Cina yang dianggap bisa mengancam penjualan produk lokal di Tanah Air. Dia menyebutkan nama aplikasi tersebut adalah Temu.

"Kementerian Koperasi itu mengkhawatirkan masuknya platform Global Cross Border yang direct, jadi kalau ini masuk ke Indonesia akan punya dampak besar kepada pelaku UMKM, namanya Temu dari Cina," ujarnya usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI Komisi VI di Jakarta, Senin (10/6/2024).

"Nah, ini yang saya khawatir ada satu lagi satu aplikasi digital, cross border yang saya kira akan masuk ke kita dan ini lebih dahsyat dari Tiktok (shop)," lanjutnya.

Lebih lanjut Teten mengatakan, saat ini aplikasi asal Cina itu sudah masuk ke 58 negara di dunia. Dia mengaku khawatir apabila aplikasi ini bisa masuk ke Indonesia, dinilai bisa merusak pasar Indonesia seperti yang dilakukan oleh TikTok Shop beberapa tahun yang lalu.

"Memang meskipun kita sudah punya aturan di Permendag 31 Tahun 2023 Tentang PPMSE tidak boleh cross border jual produk di bawah 100 dollar AS. Saya khawatir, dulu kan TikTok melanggar aturan dibiarkan 2 tahun sama pemerintah. Ini saya hanya warning saja karena keadaan ekonomi UMKM bisnisnya sedang turun," kata Teten.

"Nah kalau ditambah lagi nanti masuk persaingan produk UMKM dengan produk dari Cina, pabrikan dari Cina, Cina yang pasti murah. Ini sudah pasti berat dong," sambungnya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi mengatur tata kelola penjualan online dengan merevisi Permendag 50 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan meluncurkan peraturan baru yakni Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam beleid itu pemerintah melarang penjualan barang impor di bawah 100 dollar AS atau Rp 1,5 juta hanya berlaku untuk barang yang dikirim secara lintas batas atau cross border.

Apa Itu Aplikasi Temu?

Temu merupakan platform e-commerce asal Cina yang mirip seperti tempat belanja online lainnya seperti Amazon, Alibaba, Shopee, dan lain-



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

lain. Di sini konsumen bisa menemukan berbagai produk mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, hingga elektronik, peralatan dapur, perlengkapan otomotif, dan masih banyak lagi.

Aplikasi Temu pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 2022, dan saat ini layanan mereka sudah tersedia di puluhan negara. Menurut data Statista, aplikasi Temu di-download 30 juta kali dalam sebulan, menjadikannya aplikasi belanja nomor satu di Apple App Store dan Google Play Store.

Temu merupakan aplikasi milik konglomerat Cina bernama PDD Holdings yang bermarkas di Dublin, Irlandia. PDD Holdings juga memiliki platform e-commerce Pinduoduo yang beroperasi di Cina.

Satu hal yang membedakan Temu dari platform e-commerce lainnya adalah harganya yang sangat murah. Misalnya, ada tablet Android 10 inch tanpa merek yang dibanderol dengan harga USD 55 atau sekitar Rp 890 ribuan.

Harga barang-barang di Temu bisa sangat murah karena produsen bisa menjual produk langsung ke konsumen. Artinya, barang bisa dikirimkan langsung dari pabrik ke konsumen tanpa harus melewati distributor, afiliator, atau pihak ketiga lainnya.

"Dari ratusan pabrik dia langsung masuk ke konsumen, jadi akan ada berapa banyak lapangan kerja di distribusi akan hilang. Nggak ada lagi itu namanya reseller, afiliator, nggak ada lagi, bahkan produknya akan sangat murah karena diproduksi massal, pabrikan, dengan menghadapi UMKM yang diproduksi kecil-kecilnya. Dan tanpa dukungan supply chain seperti industri lain," ujar Menteri Teten.

Sejumlah produsen perangkat elektronik seperti Xiaomi dan Lenovo juga memiliki lapak resmi di Temu. Toko resmi ini biasanya memiliki centang biru di profilnya sebagai tanda keasliannya.

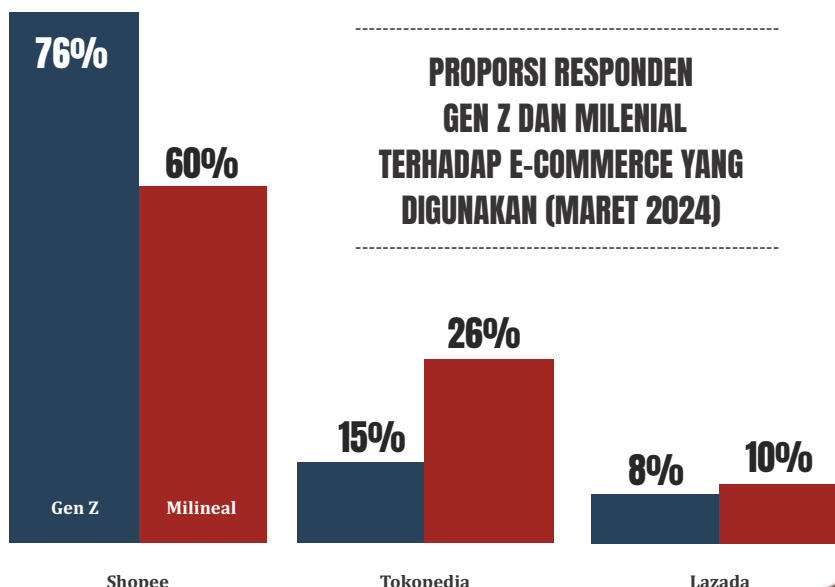
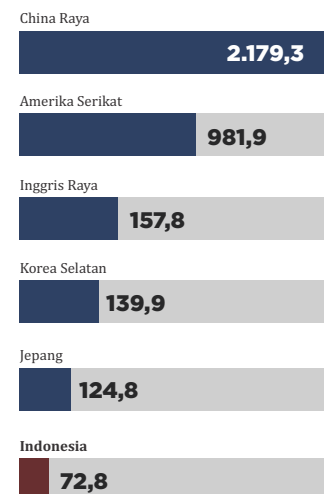
Tapi kehadiran Temu di beberapa negara terbilang kontroversial.

Pemerintah Amerika Serikat pernah menuduh Temu sebagai aplikasi berisiko setelah Google menangguhkan aplikasi Pinduoduo karena berisi malware.

Selain itu, media sosial juga diramaikan dengan beragam keluhan dari pengguna Temu. Misalnya, ada yang mengeluhkan produk yang dibeli dari Temu baru sampai berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah dipesan, atau bahkan tidak datang sama sekali.

Karena harganya yang sangat murah, sejumlah pengguna mengaku menerima produk dengan kualitas yang seadanya. Temu tidak memiliki akreditasi dari Better Business Bureau (BBB) di Amerika Serikat dan memiliki rating rata-rata 2,5 dari bintang lima. (wid,rls,ist,dtc/dya)

PENDAPATAN SEGMENT E-COMMERCE 2023 BERDASARKAN 9 NEGARA TERATAS (US\$ DOLAR)



Tampilan aplikasi Temu yang dikhawatirkan merugikan produk UMKM lokal Indonesia

Soal Pembagian Izin Tambang untuk Ormas Agama Komisi VII DPR RI: Bisa Jadi Jebakan Batman

JAKARTA- Penolakan kebijakan pemerintah untuk memberikan prioritas penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan teris berdebu. Komisi VII DPR RI menilai daripada bagi-bagi izin tambang (business sharing), lebih masuk akal jika dilakukan bagi-bagi keuntungan (profit sharing).

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengatakan kebijakan ini juga menyalahi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, sebab pemberian WIUPK ini secara prioritas tanpa lelang.

"Membentuk badan usaha milik ormas, memberikan prioritas IUPK, lalu mencari kontraktor untuk perusahaan tambang bagi ormas adalah intervensi yang terlalu jauh, memaksakan diri dan dengan risiko yang tinggi. Kita mengkhawatirkan ini bisa jadi 'jebakan Batman' bagi ormas," kata Mulyanto dalam siaran pers, dikutip Senin (10/6/2024).

Menurut Mulyanto, lebih baik pemerintah melakukan pembagian keuntungan usaha pertambangan untuk ormas dibandingkan dengan pemberian izin tambang.

"Dibandingkan membagi tanggung-jawab untuk perusahaan tambang, apalagi dengan membentuk badan usaha 'jadi-jadian', seperti badan usaha milik ormas. Ini terlalu memaksakan diri," ujarnya.

Mulyanto menyebut, pembagian keuntungan pengelolaan pertambangan kepada ormas dapat berbentuk bantuan program CSR (corporate social responsibility) secara tetap dan reguler.

Selain CSR, keuntungan juga dapat dilakukan melalui pemberian PI (participating interest) sebagaimana yang diterima Pemda yang di wilayahnya ada pertambangan.

"Ini lebih logis dan realistis serta tidak menyalahi UU. Kita dapat menimba dari pengalaman profit sharing selama ini dan tentunya itu dapat dievaluasi dan disempurnakan," kata dia.

Mulyanto menyampaikan, mengelola sektor pertambangan sangat berat dan penuh risiko, baik kepada keuangan negara, masyarakat maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu menurutnya pengelolaan tambang membutuhkan spesialisasi dan profesionalitas.

Terlebih dengan banyaknya kasus-kasus tambang yang merugikan masyarakat serta lingkungannya, ditambah lagi kasus ribuan izin tambang yang 'tidur' atau tidak dikelola meskipun telah mengantongi izin. "Kami tidak ingin ormas terkena kutukan sumber daya alam. Alih-alih untung, yang ada malah buntung dan merepotkan umat," ucapnya.

Pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan ini tertuang dalam



(Ilustrasi) Situasi di site PT Kaltim Prima Coal (KPC), Sangatta, Kalimantan Timur. (Dok ist)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang telah diterbitkan pada (30/5). Aturan tentang penawaran WIUPK ormas ini diatur dalam pasal 83A ayat 1-7.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi ayat 1 pasal 83A dalam beleid tersebut.

Regulasi tersebut menuliskan bahwa WIUPK yang akan diberikan kepada ormas keagamaan merupakan wilayah bekas PKP2B. "Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku," bunyi aturan tersebut.

Dalam beleid tersebut dituliskan bahwa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang telah didapatkan ormas tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri. "Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali," tulis beleid.

Ketika mengoperasikan IUPK yang didapat, badan usaha milik ormas yang bertindak sebagai pengendali dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B ataupun pihak yang terafiliasi.

"Bahwa pemberian kepastian investasi melalui deregulasi kebijakan dan birokratisasi di sektor Mineral dan Batu bara terus dilakukan dalam bentuk penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis akhir beleid tersebut.

Bahlil Komentari Ormas yang Menolak

Diketahui, ada sejumlah penolakan dari organisasi masyarakat (ormas) keagamaan terkait izin pengelolaan tambang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Merespons hal itu, Menteri

Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara.

Bahlil menilai, adanya percikan kontra dari sebagian ormas hanya karena mereka belum memahami penuh aturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Untuk itu, Bahlil mengaku dia bakal turun langsung mengkomunikasikan isi dan tujuan aturan kepada ormas-ormas terkait.

Sosialisasi perihal izin tambang dari pemerintah ini, kata Bahlil, merupakan bentuk bujukan dan rayuan untuk ormas yang asalnya menolak menerimanya.

"Ke depan kami akan mengkomunikasikan. Nanti dilihat kalau misalnya katakan lah setelah mereka tahu isinya, tujuannya dan mau menerima, alhamdulillah kan. Kalau nggak ya kita nggak boleh memaksa kan," ujar Bahlil, di Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

"Saya yakin bahwa semua ada tujuan baik dan sesuatu yang baik insyaAllah akan menghasilkan sesuatu yang baik," kata dia lagi.

Bahlil lantas menegaskan kembali bahwa proses serah terima izin tambang ini sejatinya tidak mudah. Terdapat banyak syarat yang ketat menuju ke kesepakatan final.

Bahkan, sebelum ke sana, Ormas bersangkutan perlu memiliki badan usaha khusus. Kemudian, jika sudah mendapatkan izin pertambangan dari negara, pengelolaan itu pantang dipindahtangankan.

"Kan kalau dilihat syaratnya juga nggak gampang kan, kan dia harus punya badan usaha dan dia harus tahu IUP-nya itu tidak bisa dipindahtangankan. Badan usaha itu juga harus punya koperasi, semoga IUP yang diberikan tidak disalahgunakan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab," papar Bahlil.

Sebelumnya, Ketum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom mengingatkan, organisasi umat Kristen Protestan itu memiliki keterbatasan dalam hal pengelolaan

DETIL PERATURAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK).

Aturan mengenai IUP itu tertuang dalam pasal 83A, yang kisi-kisinya sebagai berikut:

- **Ayat 1:** Memberikan jatah izin tambang WIUPK pada ormas lewat badan usaha yang dimiliki oleh ormas tersebut. Wilayah yang dimaksud di sini adalah wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP2B.
- **Ayat 3:** IUPK dan/atau kepemilikan saham badan usaha ormas yang mengelola WIUPK tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan menteri.
- **Ayat 4:** Kepemilikan saham ormas keagamaan dan badan usaha ormas tersebut harus mayoritas dan menjadi saham pengendali.
- **Ayat 5:** Badan usaha ormas tidak diperbolehkan bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya maupun organisasi apapun yang merupakan afiliasinya.

suatu tambang. Di samping itu, pertambangan bukanlah bagian dari pelayanan pihaknya.

"Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI," kata Gomar Gultom.

Menurutnya, PGI selama ini aktif dalam mendampingi korban-korban kebijakan pembangunan, termasuk korban usaha tambang. Jadi, ada kemungkinan bila ikut menerima IUP, organisasi tersebut akan berhadapan dengan dirinya sendiri. Dalam arti, sangat rentan kehilangan legitimasi moral.

"Saya tentu menghormati keputusan lembaga keagamaan yang akan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh PP tersebut. Dalam kaitan inilah saya menyambut positif kebijakan ini, seraya mengingatkan perlunya kehati-hatian," ujar Gomar Gultom.

Senada dengan PGI, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga mengambil sikap hati-hati terhadap peluang yang diberikan PP Nomor 25/2024 tersebut. Uskup Agung Jakarta Prof Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo mengungkapkan bahwa organisasi yang menghimpun uskup-uskup Katolik seluruh Tanah Air itu tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang batu bara.

"Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya," katanya. (wid,tro,rls/dya)

Di Awal Pemerintahan Prabowo, Utang Jatuh Tempo Tembus Rp 800 T

JAKARTA -Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan 'mewarisi' utang yang relatif besar di awal pemerintahannya. Diketahui, utang Indonesia yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Meski demikian, Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan menilai, selama pasar keuangan baik utang itu masih bisa dikelola.

"Ibu (Menteri Keuangan) menyampaikan kemarin kan selama pasar keuangan kita baik, selama confident dari masyarakat, dari investor bagus itu sesuatu yang masih bisa kita manage," katanya di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Dia mengatakan, rata-rata utang yang jatuh tempo per tahun antara Rp 600-700 triliun. Utang yang jatuh tempo menembus Rp 800 triliun karena ada utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

"Biasanya itu sekitar Rp 600 sampai Rp 700 triliun, cuma tahun depan itu kan jatuh tempo karena ada SBN yang diterbitkan dalam rangka penanganan pandemi COVID jadi sebagian sekitar Rp 100 triliun yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI)," katanya.

Dia mengatakan, persoalan utang



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, dan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN TA 2025 dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI. (Dok IG @smindrawati)

ini juga telah dibicarakan dengan BI. Dengan demikian, kata dia, diharapkan dapat memberikan solusi terbaik.

"Jadi ini sesuatu hal yang bisa dibicarakan, sudah ada timnya dari pemerintah dengan BI untuk kita mendiskusikan bagaimana kita menangani SBN yang jatuh tempo tahun depan, yang sebetulnya diterbitkan dalam rangka untuk penanganan pandemi, supaya nanti bisa mendapatkan solusi terbaik, di satu sisi juga dalam rangka menjaga untuk sustainability fiskal kita," terangnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyoro profil utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp782 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan anggaran belanja negara yang rencananya ditetapkan sekitar Rp3.500 triliun untuk tahun anggaran 2025.

"Apakah ini diserap di APBN 2025 atau enggak? Kalau diserap APBN yang [anggaran belanja negara] Rp3.500 triliun itu untuk bayar utang saja udah Rp782 triliun," katanya, Rabu

(5/6/2024).

Di samping itu, Dolfie juga menyoro penarikan utang baru oleh pemerintah yang mencapai sekitar Rp600 triliun untuk menutup defisit anggaran yang diperkirakan sebesar 1,45% hingga 2,82% dari PDB. "Utang yang nanti akan ditutup kan lewat SBN dan pinjaman, SBN yang nanti akan disepakati saat rapat kerja, jadi kita perlu tahu data-datanya, utang yang di postur kurang lebih Rp600 triliun," jelasnya.

Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah pada April 2024 mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Perbesar Posisi utang tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 38,79% dari PDB.

Berdasarkan Buku APBN Kita Edisi Mei 2024, dijelaskan bahwa mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,18%, sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang yang mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,94%. (wid,rls,ist/dya)

Kode Kuota Impor Naik? Produksi Beras di 2024 Diramal Kurang 5 Juta Ton

JAKARTA - Tahun ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap ada potensi kekurangan produksi beras hingga 5 juta ton. Meski begitu pihaknya masih yakin produksi dalam negeri bisa digenjut.

"Ini potensi kekurangan, kurang lebih 5 juta ton, potensi kekurangan (produksi tahun ini)," jelas Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, ditemui di DPR RI, Senin (10/6/2024).

Saat ditanya, apakah akan ada penambahan impor beras tahun ini, Arief belum bisa memastikan. Ia menyebut saat ini saja masih ada kuota impor beras 1,6 juta ton yang belum dilakukan. Tahun ini pihaknya bersama Perum Bulog baru menyelesaikan impor beras sebanyak 2 juta ton.

"Sekarang saja dari 3,6 juta ton (kuota impor beras) baru 2 juta ton juga. Nanti kalau diperlukan (impor dilakukan). Kita usahakan dalam negeri, kita lagi minta dorong produksi dalam negeri. Sayang kalau 3 juta ton

saja itu Rp 30 triliun, sayang kita ambil dari luar (luar negeri)," jelasnya.

Arief mengatakan untuk melakukan impor cukup sulit karena prosedur yang dilakukan rumit. Hal itu terkait dengan pencarian barangnya, kemudian harga yang tak menentu karena mengikuti kurs dolar, hingga bongkar muat di pelabuhan yang memakan waktu.

"Ambil dari luar itu kan juga effort, kita nggak mudah cari barang, currency sudah Rp 16.200, hari ini sudah Rp 16.300, sayang. Mendingan di Indonesia, apapun caranya ya termasuk ketersediaan air, pupuk, benih, penambahan luas lahan yang itu kewenangannya ada di Kementan," terangnya.

Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief mengungkap produksi pada Januari sampai Juli 2024 saja diprediksi menurun 2,64 juta ton. Angka itu didapat dari proyeksi Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS).

"Proyeksi KSA BPS, amatan April

2024 total produksi beras Januari sampai Juli 2024 18,64 juta ton lebih rendah 2,64 juta ton (-13,25%) dibanding periode yang sama pada periode tersebut. Hal tersebut menjadi konsen kami menghadapi bulan-bulan berikutnya mengingat kita memasuki musim kemarau," jelas dia.

Dalam paparan Arief juga tertulis bahwa produksi beras pada Mei produksi beras tercatat hanya 960 ribu ton, atau lebih rendah 1,19 juta ton dari kebutuhan konsumsi masyarakat.

Lalu produksi di Juni juga diprediksi hanya 760 ribu ton atau lebih rendah dari konsumsi sebesar 1,22 juta ton. Terakhir kebutuhan konsumsi beras pada Juli diprediksi sebanyak 1,27 juta ton. Namun produksi beras pada bulan tersebut hanya 1,02 juta.

Pemerintah melalui Badang



Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi

Pangan Nasional sebenarnya baru saja menaikkan harga beras eceran sejak 1 Juni 2024, baik di pasar tradisional maupun retail modern. (wid,rla,ktn/dya)

KPU Akui Sedang Harmonisasi PKPU Putusan MA soal Syarat Usia Maju Pilkada

JAKARTA - Ketua KPU RI Hasyim As'ryari mengatakan pihaknya tengah mengharmonisasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengatur batas usia calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) 30 tahun saat dilantik. Hasyim belum dapat memastikan apakah dampak putusan MA itu akan mengubah Peraturan KPU (PKPU) di Pilkada 2024.

"Ini masih diharmonisasi," kata Hasyim usai rapat bersama Komisi II DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Hasyim mengatakan harmonisasi PKPU itu dilakukan KPU bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemendagri) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, pembahasan PKPU itu belum ditargetkan apakah akan rampung sebelum tahapan pendaftaran cagub dan cawagub dilaksanakan.

"Sedang kita bahas ya. Iya, kan sedang dibahas dan harmonisasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

"Ya sedang dibahas. Karena kalau harmonisasi kan ada pihak KPU sebagai pihak yang menyelenggarakan harmonisasi dan kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bawaslu. Jadi masih dibahas. Sudah dua kali harmonisasi tapi belum selesai," kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan salah satu hal yang membuat pembahasan PKPU itu belum kunjung rampung lantaran belum ada kepastian tanggal pelantikan cagub dan cawagub. Sebab, saat cagub-cawagub telah dilantik, Hasyim mengatakan prosesnya sudah bukan dalam ranah kewenangan KPU, melainkan presiden.

"Yang ada kepastiannya itu adalah ketika penetapan pasangan calon, 22 September 2024, itu kan jelas ada patokannya. Tapi kan kalau pelantikannya kapan kan KPU belum tahu, karena begitu sudah pelantikan sebetulnya ranahnya sudah bukan ranah KPU lagi," kata Hasyim.

"Untuk pilkada, itu KPU sampai dengan pada kegiatan penetapan calon terpilih. Setelah itu kan prosesnya disampaikan pada pemerintah pusat, seperti bupati, wali kota, atas nama presiden yang menerbitkan SK Mendagri. Nah untuk gubernur yang menerbitkan SK Presiden atau Keppres," kata Hasyim.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, "Kalau pemerintah, biasanya kalau kita, kalau KPU sudah memutuskan dengan DPR ya pemerintah kan bukan bagian dari



Ketua KPU Hasyim As'ryari (tengah) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar (kanan) saat mengikuti rapat konsultasi dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok.Ant)

penyelenggara Pemilu. Kita ngikut aja," kata Tito kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Tito menjelaskan, apabila nanti KPU telah menerbitkan PKPU yang baru, lalu ada keberatan dari pihak-pihak lain, ada mekanisme yang dapat dilakukan.

"Bisa mekanisme ke Mahkamah Agung lagi ya. Kalau melanggar

undang-undang, dianggap melanggar undang-undang bisa melalui MK gitu," ucap dia.

Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa pemerintah adalah bukan bagian dari penyelenggara Pemilu. Sehingga pemerintah hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

"Tapi kalau dari sisi pemerintah, kita bukan penyelenggara Pemilu.

DETIL-DETIL PUTUSAN

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) huruf d dalam Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 10 tahun 2016. Atas adanya putusan tersebut, aturan KPU diubah.

Sebelumnya, bunyi pasal 4 ayat (1) huruf d: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

Jika mengacu pada aturan tersebut, mereka yang sudah berusia 30 tahun baru bisa mendaftar gubernur atau wakil gubernur. Lalu berusia 25 tahun untuk bupati atau wakil bupati dan setingkatnya.

Namun aturan tersebut diubah oleh MA menjadi:

Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih.

Perubahan ada pada frasa 'terhitung sejak penetapan' menjadi 'terhitung sejak pelantikan'.

Sesuai aturannya, aturan penyusunan PKPU itu diatur oleh KPU dengan berkonsultasi kepada DPR. That's it. Tidak melibatkan pemerintah," tandasnya. (wid,kum,rls/dya)

Mendagri Sebut Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Diganti pada Bulan Juli

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bakal mengganti penjabat (Pj) kepala daerah yang maju di Pilkada 2024 pada pertengahan Juli mendatang.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2024).

"Kami sudah sampaikan kemungkinan besar pertengahan Juli yang ingin running, dia harus kita ganti. Dan, itu enggak ada aturan UUnya, tapi kami yang ambil kebijakan karena ada bahasa sebelum satu tahun," kata Tito dalam rapat.

Tito mengaku takkan menghalangi para penjabat yang hendak maju di pilkada nanti. Namun ia menekankan ada aturan yang wajib diikuti nanti.

Ia mengatakan telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh

penjabat kepala daerah, yang isinya Tito meminta kepada para Pj kepala daerah yang mau mencalonkan diri di Pilkada 2024 agar menginformasikan ke Kemendagri.

Tito menjelaskan Kemendagri memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan sosok pengganti sebagai penjabat kepala daerah.

Ia menyebut proses pengisian posisi penjabat itu akan dimulai lagi dari awal, Kemendagri pun enggan asal menunjuk pengganti.

"Kita harus kirim surat lagi ke DPRD-nya, ke Pj Gubernur atau gubernurnya untuk mengirimkan nama-nama lagi," ucap eks Kapolri itu.

Tito menyatakan ia menerapkan kebijakan itu karena tak ingin para penjabat kepala daerah yang maju di



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Pilkada 2024 nanti akan menggunakan fasilitasnya sebagai penjabat untuk berkampanye.

Ia menekankan kebijakan itu diambil guna menekan potensi konflik kepentingan yang bisa saja terjadi ke depan. (wid,rls,ist/dya)

14 Pejabat Perumda Tirta Kanjuruhan Berebut Kursi Direksi Tugu Tirta Kota Malang



Pendaftaran beberapa pejabat Tirta Kanjuruhan Kab Malang, sebagai calon anggota Direksi Perumda Tugu Tirta di Kantor Sekretariat Seleksi, Bagian PISDA Kota Malang, Senin (10/6/2024). (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Sebanyak 14 pejabat struktural dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, resmi mendaftarkan diri dalam seleksi calon Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Senin (10/6/2024).

Direktur Utama Perumda Tirta

Kanjuruhan, Syamsul Hadi mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap seleksi yang diselenggarakan. Sekaligus menjadi ajang kaderisasi dan peningkatan kompetensi bagi para pejabat muda di lingkungan Perumda Tirta Kanjuruhan.

"Kami merespon positif informasi Seleksi Calon Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang, yang disampaikan beberapa waktu lalu, melalui media sosial resmi Perumda Tugu Tirta maupun Pemkot Malang," ujar Syamsul, saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/6/2024).

Diketahui sebelumnya, Pemkot Malang melalui Pansel Anggota Direksi Perumdam Tugu Tirta Kota Malang, telah menerbitkan pengumuman tentang Seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tugu Tirta, pada 31 Mei 2024 lalu.

Dalam hal ini, Syamsul mengungkapkan, sebanyak 14 pejabat struktural tersebut telah memiliki sertifikat manajemen air minum untuk Tingkat Muda maupun Tingkat Madya. Yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi Air Minum Indonesia (LSPAMI).

Syamsul juga menyampaikan, keikutsertaan 14 pejabatnya dalam seleksi Direksi Perumdam Tugu Tirta juga berkaitan erat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ada.

Menurutnya, Perumda Tugu Tirta merupakan mitra Tirta Kanjuruhan dalam pemanfaatan sumber air baku dari mata air Sumber Wendit di Kecamatan Pakis dan mata air Sumber Pitu di Kecamatan Tumpang.

"Intinya kami sudah mempersiapkan 14 pejabat tersebut dengan baik, sehingga siapapun pejabat Perumda Tirta Kanjuruhan yang berhasil lolos dalam seleksi ini, pasti akan kami dukung sepenuhnya," tegas Syamsul.

Sementara itu, Ketua Pansel Anggota Direksi Perumdam Tugu Tirta Kota Malang, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS, IPU, mengonfirmasi hingga saat ini telah terdapat 30 orang yang mendaftarkan diri dalam seleksi tersebut.

"Pendaftaran ditutup hari ini, 10 Juni, pukul 15.00 WIB. Pendaftar berasal dari berbagai daerah seperti Medan, Ciamis, Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, dengan pendaftar terbanyak dari Kabupaten dan Kota Malang," ungkap Bisri, saat dikonfirmasi melalui sambungan selular. (Santi/Dya)

DPRD Kota Malang Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Bansos di APBD 2023

MALANG - DPRD Kota Malang menyoroti rendahnya serapan anggaran bantuan sosial (bansos) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rindiana Kartika, menyoroti ketidakefektifan penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Sosial dalam mendistribusikan bantuan sosial tersebut, hanya terserap sebesar 56 persen dari target yang ditetapkan.

"Kita melihat dari jawaban Pj Wali Kota tadi, ada yang kami soroti yaitu di Dinas Sosial untuk bantuan masyarakat tidak mampu, justru ada SILPA di situ. Kami akan mintai jawaban Dinsos terkait LKPJ APBD 2023 di hearing nanti," ujar Made, ditemui usai Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Wali Kota terhadap PU Fraksi atas LKPJ APBD 2023, Senin (10/6/2024).

Sementara itu, Kadinsos Kota Malang, Donny Sandito, menanggapi sorotan mengenai rendahnya penyerapan bantuan pangan non tunai



Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat menyampaikan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2023, Senin (10/6/2024). (Santi/Lenteratoday)

daerah (BPNTD) untuk masyarakat kurang mampu. Donny menjelaskan, kendala utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan yakni belum turunnya Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur pelaksanaan BPNTD.

"Kalau itu karena memang Perwalnya belum turun. Sehingga kita

belum bisa mengeksekusi secara maksimal. Perwalnya kan mengatur BPNTD itu, belum tahu kapan turunnya dari bagian hukum. Baru kalau Perwal turun, kita bisa maksimal," jelasnya.

Terpisah, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menambahkan, faktor penyebab rendahnya serapan bansos

cukup bervariasi, mulai dari sisa anggaran bantuan sosial yang tidak terpakai secara optimal hingga ketidaksesuaian syarat penerima.

Wahyu mengatakan, dari target belanja daerah sebesar Rp 21 miliar 498 juta, realisasi penyerapan anggaran belanja bantuan sosial hanya mencapai 56,82 persen atau sebesar Rp 12 miliar 215 juta.

"Faktor penyebabnya satu, karena sisa anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang tidak sepenuhnya terserap karena beberapa penerima tidak memenuhi syarat domisili di Kota Malang," jelas Wahyu.

Namun demikian, pria yang juga menjabat sebagai Sekda definitif Kabupaten Malang ini menekankan, terdapat peningkatan dalam penanganan SILPA tahun anggaran 2023, yang mencapai Rp 199 miliar 626 juta, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

"SILPA tahun 2023 kan bisa dikatakan jauh lebih baik, dibandingkan tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp 460 miliar 453 juta," paparnya. (Santi/Dya)



HERMES PILIH NEW YORK UNTUK PENTAS PERAGAAN YANG PERTAMA

JENAMA fesyen Hermes memilih kota New York di Amerika Serikat sebagai lokasi untuk menampilkan apa yang disebutnya "Bab Kedua" dari koleksi Musim Gugur-Musim Dingin 2024, yang pertama kali ditampilkan di Paris pada bulan Maret.

Melansir Hollywood Reporter pada Jumat (7/6), Direktur kreatif merek Hermes Nadège Vanhée selalu menyatakan keinginannya untuk tampil di Big Apple, setelah dirinya tinggal di NY selama bertahun-tahun sebagai desainer di The Row.

Peragaan busana tersebut dipentaskan di Pier 36 pada Kamis malam (6/6), di mana kerlap-kerlip belasan lampu lalu lintas dekoratif menandai runway walk model-model seperti Anok Yai, Irina Shayk, dan Paloma Elsesser dengan tema "Luck of Lucien" oleh A Tribe Called Quest.

Dalam sekuel pertunjukan di Paris ini, rangkaian pakaian yang familiar dipamerkan, didesain ulang dengan gaya sporty dengan aksen urban.

Selimut kuda Rocobar menampilkan siluet arsitektur dengan warna oker cerah.

Jaket kompetisi telah diciptakan kembali atas nama kelembutan, dengan tali kulit berpadu indah dengan rajutan.

Secara keseluruhan, hal-hal yang bermanfaat menggabungkan hal-hal yang menyenangkan dalam penafsiran

ulang perkotaan dan feminin.

Di antara selebritas yang menyaksikan presentasi fesyen yang eklektik, plural, dan optimis adalah Usher, Jenny Slate, dan Lily Allen.

Sorotan lain dari koleksi ini, yang dilengkapi dengan gelang kaku, adalah jaket bulu angsa dan jas hujan, celana kulit hitam, dan jaket berwarna kuning mustard.

Seperti dilaporkan Womens Wear Daily, koleksinya Hermès mungkin tidak banyak berubah, tetapi Vanhee pantas mendapatkan pujian karena mengubah penawaran fesyen rumah mode tersebut menjadi sesuatu yang lebih muda dan lebih diminati.

Dia memusatkan perhatian pada beberapa siluet utama, termasuk jaket berkendaraan perfecto yang dipotong dengan presisi seperti laser, diikatkan ke pinggang dengan sabuk kulit lebar yang tersembunyi di dalam dan tidak ada pengikat eksterior lainnya.

Dipadukan dengan celana panjang dan sepatu bot koboi Hermès yang serasi hingga jaket biker hitam bertabur perak yang pas dan halus serta celana kulit ketat.

Profil

Hermès merupakan sebuah luxurious brand kenamaan asal Prancis yang sudah sangat terkenal khususnya di kalangan sosialita.

Adalah Thierry Hermes, seorang

pria kelahiran Krefeld, Jerman pada 1801. Pria ini merupakan anak dari pasangan pemilik penginapan di Jerman.

Karena adanya perang dan wabah penyakit yang meluas, ia kehilangan seluruh anggota keluarganya dan akhirnya Thierry pun memutuskan untuk pindah ke Prancis.

Hingga pada 1837, ia membangun sebuah industri pabrik kecil yang khusus mengerjakan kerajinan berbahan kulit.

Pabrik tersebut pada saat itu khusus membuat perlengkapan kuda yang banyak digunakan para bangsawan Grands Boulevard.

Awal bisnis Hermès memang mengutamakan keterampilan tangan atau handcraft. Thierry tidak maSejak 1837, Hermès sudah dikelola oleh enam generasi sampai sekarang. Ketika. Thierry wafat, ia mewariskan

bisnisnya pada istrinya, Christine Pétronille Pierrart. Bengkel warisannya makin berkembang, produknya pun bisa dijual secara ritel ke negara lain seperti Afrika Utara, Rusia, sampai Amerika.

Pada 1918, Hermès dipimpin oleh generasi ketiga, yaitu Adolphe dan Emile-Maurice. Hermès pun mulai memproduksi pakaian dan aksesoris lain seperti jaket golf yang dipakai Prince of Wales. Hermès makin terkenal di dunia kaum sosialita Eropa pada era 1950.

Di tahun 2013, Hermès dipegang oleh Axel Dumas dan mulai membuka banyak toko di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Axel Dumas akhirnya membawa gebrakan era teknologi baru pada 2017 dengan mendesain ulang official website Hermès yang membawa Hermès semakin populer (Antara-akseleran)



**NADÈGE
VANHÉE**

Sumber Foto:
OK McCausland



Hermès Second Chapter di New York. (Foto: Reuters)



TANDA-TANDA TUMOR OTAK YANG SERING DIABAIKAN

HARI Tumor Otak Sedunia diperingati setiap 8 Juni untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tumor otak, yang ditandai dengan tumbuhnya sel-sel abnormal di dalam atau di sekitar otak.

Sakit kepala merupakan salah satu gejala paling umum yang dialami hampir separuh dari orang yang menderita tumor otak.

Gejala lainnya bisa meliputi kejang, kaki atau tangan lemah atau mati rasa, ketidakseimbangan ketika berjalan, kehilangan pendengaran, perubahan perilaku, penglihatan ganda, dan kehilangan memori.

Gejala tumor otak dapat bervariasi tergantung pada lokasinya. Beberapa gejalanya dapat tidak terduga dan kebanyakan orang mungkin tidak mengaitkannya dengan tumor otak.

Sebagaimana dikutip oleh Hindustan Times pada Sabtu, Dr Rahul Gupta, Direktur Bedah Saraf dari Rumah Sakit Fortis di India menyampaikan tanda-tanda tumor otak yang sering diabaikan orang.

BERIKUT TANDA-TANDA TUMOR OTAK YANG DIMAKSUD.

Perilaku abnormal

Orang yang terserang tumor otak

mungkin menjadi pendiam, tidak kooperatif, tidak tertarik pada lingkungan sekitar, gelisah, atau bingung. Mereka mungkin mengunjungi psikiater atau dokter yang mungkin memulai pengobatan tanpa melakukan pemeriksaan radiologi apapun.

Pasien yang demikian kondisinya bisa membaik sementara waktu, tetapi kemudian dengan cepat memburuk. Pasien seperti ini biasanya mempunyai tumor di lobus frontal.

Kehilangan penglihatan

Tekanan pada jalur optik dapat menyebabkan masalah penglihatan. Kehilangan penglihatan sebagian dapat terjadi pada orang yang mempunyai tumor hipofisis.

Gangguan hormonal

Kelainan menstruasi, infertilitas, pertumbuhan terhambat, masalah tiroid, dan gigantisme bisa terjadi karena ketidakseimbangan hormon yang kemungkinan disebabkan oleh tumor pada otak.

Ketidakseimbangan saat jalan

Beberapa pasien dengan tumor di bagian belakang otak atau peningkatan tekanan cairan otak

mungkin mengalami ketidakseimbangan saat berjalan, sehingga terlihat seperti orang mabuk.

Masalah pendengaran

Tumor yang muncul pada saraf kranial kedelapan dapat menyebabkan gangguan pendengaran pada salah satu telinga.

Anggota badan melemah

Lobus frontal adalah lokasi umum terjadinya tumor otak primer dan metastatik, yang sering menyebabkan kelemahan motorik pada wajah atau anggota tubuh kontralateral.

Masalah bahasa

Tumor pada lobus frontal inferior atau temporal superior pada belahan otak dominan sering kali menyebabkan kesulitan berbahasa.

Masalah penglihatan

Tumor otak dapat menyebabkan masalah penglihatan yang berbeda tergantung pada bagian mana dari jalur penglihatan yang terlibat.

Masalah penglihatan



yang terjadi dapat berupa skotoma hingga kebutaan monokular, cacat penglihatan, dan penglihatan ganda.

Kejang

Serangan baru atau peningkatan frekuensi maupun tingkat keparahan kejang bisa jadi merupakan tanda perkembangan tumor.

Mual dan muntah

Mual dan muntah bisa jadi merupakan tanda peningkatan tekanan intrakranial pada pasien tumor otak, dan paling sering terjadi pada pasien dengan tumor fossa posterior (Antara)



REALME GT 6 MELUNCUR, TAWARKAN LAYAR PALING TERANG DI DUNIA

REALME akan meluncurkan ponsel pintar realme GT 6 di Milan, Italia pada 20 Juni, menawarkan layar paling terang di dunia dengan 6.000 Nits Ultra Bright Display.

Dengan mengusung 6.000 nits Ultra Bright Display pertama di industri, realme GT 6 memastikan visibilitas dan kegunaan yang luar biasa khususnya di luar ruangan, bahkan dalam kondisi sinar matahari yang paling terik sekalipun, dengan tetap menjaga efisiensi daya.

realme merancang realme GT 6 agar dapat bekerja dengan baik di lingkungan dengan

cahaya matahari yang intens.

Kemampuan untuk mempertahankan visibilitas dalam kondisi ekstrem diklaim tidak hanya meningkatkan kepraktisan tetapi juga memastikan pengalaman visual yang lebih baik bagi para pengguna.

realme GT 6 juga menghadirkan teknologi HDR dan Pro-XDR untuk meningkatkan pengalaman pengguna, khususnya saat bermain game.

Teknologi ini menghadirkan rentang warna dan tingkat kecerahan yang lebih luas, sehingga menghasilkan visual yang lebih immersif, khususnya bagi para gamer.

Ketika diaktifkan, fitur Pro-XDR akan secara aktif meningkatkan rentang dinamis untuk warna hitam yang lebih pekat dan warna-warna lainnya yang lebih cerah.

Dilengkapi dengan sensor yang melakukan pemantauan cahaya sekitar secara konstan, realme GT 6 dapat beradaptasi dengan 10.240 tingkat kecerahan, memastikan pengaturan kecerahan layar optimal secara real-time di berbagai kondisi pencahayaan.

realme GT 6 turut meningkatkan pengalaman pengguna dengan teknologi 8T LTPO. Dengan mengadaptasi kecepatan refresh layar berdasarkan konten, LTPO secara signifikan mengurangi konsumsi daya hingga 20 persen, menawarkan penghematan energi yang sebanding dengan baterai sebesar 300mAh.

Teknologi ini secara tidak langsung memperluas kinerja baterai secara keseluruhan ke tingkat yang sebanding dengan 5800mAh (kapasitas dasar 5500mAh + penghematan daya layaknya memiliki baterai 300mAh), sehingga pengguna dapat menikmati penggunaan perangkat yang lebih lama tanpa mengorbankan kecerahan layar atau kinerja ponsel.

Teknologi 8T LTPO mengoptimalkan penggunaan energi dengan menurunkan refresh rate untuk konten gambar statis dan meningkatkannya untuk visual yang lebih mulus dalam adegan-adegan yang bergerak cepat pada konten video.

Penyesuaian ini memungkinkan pengguna untuk menikmati pengguliran yang mulus, game yang

responsif, dan masa pakai baterai yang lebih lama.

realme GT 6 juga menghadirkan teknologi peredupan PWM 2160Hz yang dapat mengatasi kelelahan mata, yang menjadi masalah umum bagi banyak pengguna ponsel terutama di lingkungan yang minim cahaya.

Dengan kecepatan kedipan lampu layar 4,5 kali lebih cepat dari kebanyakan ponsel, realme GT 6 diklaim mampu menghilangkan kedipan, memberikan gambar yang lebih mulus dan konsisten sehingga lebih nyaman dipandang.

Guna meminimalkan kelelahan pada mata, realme GT 6 juga dilengkapi dengan sistem perlindungan mata berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang secara cerdas menyesuaikan pengaturan layar berdasarkan pola penggunaan dan cahaya sekitar.

Hal ini termasuk penyesuaian kecerahan dan temperatur warna yang halus, terutama dalam kondisi cahaya redup. Untuk penggunaan di malam hari, mode Sleep khusus secara otomatis mengubah layar ke nuansa warna yang lebih hangat, menyesuaikan dengan ritme tidur alami tubuh untuk pengalaman menonton yang lebih nyaman dan tidur yang lebih nyenyak.

realme GT 6 telah menerima empat sertifikasi, meliputi sertifikasi SGS Five-star Esports Display pertama di dunia, sertifikasi SGS Five-star Sunlight-Readable Display pertama di dunia, SGS AI Eye-Protection Display pertama di dunia, dan sertifikasi TÜV Rheinland Flicker Free Display (Antara)



POV DAN PICK ME, BAHASA GAUL YANG SERING DIPAKAI DI MEDIA SOSIAL

BAHASA gaul di media sosial (medsos) seperti X (dulu Twitter), TikTok, dan lainnya, tak terhitung lagi jumlahnya. Dari sekian banyak bahasa gaul itu, terdapat salah satu kata yang sering dipakai pengguna.

Adapun kata itu adalah POV. Sebagian dari Anda mungkin juga sudah sering melihat kata tersebut muncul di linimasa media sosial.

Meski sudah sering melihat kata itu muncul di medsos, beberapa pengguna mungkin belum mengetahui arti POV.

Lantas, sebenarnya apa itu POV? Jika tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak penjelasan di bawah ini mengenai arti POV sebagai bahasa gaul yang sering dipakai pengguna di medsos.

Arti POV sebagai bahasa gaul di media sosial

Untuk diketahui, di medsos, kata POV kerap dipakai dalam beberapa situasi. Misalnya, kata POV biasa dipakai ketika pengguna hendak mengawali memberikan komentar untuk mengomentari sesuatu.

Kemudian, kata POV juga kerap pula dipakai untuk menunjukkan gambar tertentu yang merupakan bagian dari sebuah peristiwa. Dari kebiasaan penggunaan kata ini di medsos, lalu apa yang dimaksud dengan POV?

Sebagai informasi, kata POV bukan termasuk kosakata dalam bahasa Indonesia, melainkan bahasa Inggris.

POV bukan pula kata tunggal. Perlu diketahui, POV adalah kata akronim atau singkatan dari istilah bahasa Inggris "point of view".

Sebagai singkatan dari istilah "point of

view", dalam bahasa Indonesia, arti POV adalah sudut pandang atau perspektif.

Kata tersebut bisa dipakai untuk menyebut bagaimana seseorang memandang, melihat, mengalami, atau merasakan sebuah fenomena tertentu.

Dengan arti yang demikian, tak heran bila kata POV kerap dipakai berbarengan dengan pernyataan atau penggambaran yang berasal dari perspektif seseorang atas sebuah kondisi tertentu.

Bila menjumpai pengguna menyertakan kata POV di media sosial maka maksudnya adalah ingin

menunjukkan sudut pandang seseorang atas sebuah kondisi.

Demikianlah penjelasan arti POV yang sering dipakai di berbagai media sosial, semoga bermanfaat.

Arti "Pick Me"

Di medsos, kata pick me umumnya digunakan untuk menilai suatu karakter dari seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Secara harfiah, arti pick me dalam bahasa Indonesia adalah "pilih aku".

Jika dilihat dari kebiasaan penggunaannya di medsos, arti pick me secara harfiah yang demikian kiranya kurang sesuai. Dikutip dari

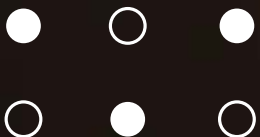
Urban Dictionary, kata pick me sejatinya tergolong sebagai bahasa Inggris gaul atau slang.

Dalam bahasa Inggris gaul, arti pick me adalah istilah untuk menyebut seseorang yang memiliki karakter untuk selalu berusaha berbeda dari umumnya, agar dilirik, tersorot, atau mendapat perhatian dari lingkungan sekitar, khususnya pasangan atau lawan jenis.

Misalnya, perempuan lazimnya suka peralatan rias dan berdandan. Namun, bagi perempuan yang dinilai sebagai pick me, mereka akan mengklaim sebaliknya untuk menjadi berbeda dari perempuan umum lain, yakni tidak menyukai peralatan rias dan berdandan. Di medsos, pick me memiliki konotasi yang negatif. Kata pick me sering dipakai untuk menyindir seseorang dengan karakter yang selalu berusaha ingin berbeda dari standar atau kebiasaan pada umumnya.

Sindiran dilayangkan karena perbedaan yang ditampilkan seseorang dengan karakter pick me berbeda hanya dipakai untuk menarik perhatian lawan jenis. Karakter pick me bisa disematkan pada laki-laki atau perempuan.

Jika laki-laki maka disebutnya pick me boy, sedangkan perempuan adalah pick me girl. (Kompas)



Seteru KPK-Hasto ... (dari Hal 1)

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diperiksa selama empat jam oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku keberatan ketika ponselnya disita.

Hasto dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku. Dia turut didampingi sejumlah penasihat hukum, salah satunya Ronny Talapessy. Namun, penasihat hukumnya tidak ikut serta dalam proses pemeriksaan.

Mulanya, Hasto mengatakan dirinya datang ke KPK dengan niat baik sebagai warga negara yang taat hukum.

"Saya di dalam ruangan yang sangat dingin, hampir sekitar 4 jam. Bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam, sisanya ditinggal, kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara," ujar Hasto usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Hasto mengaku telepon selulernya disita di tengah proses pemeriksaan. Dia pun sempat berdebat dengan pihak penyidik lembaga antirasuah.

"Di tengah-tengah itu, kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian, tasnya dan handphone-nya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat. Karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saya berhak untuk didampingi penasihat hukum," jelas Hasto.

Hasto kembali menegaskan bahwa dirinya keberatan atas penyitaan tersebut.

Selain itu, Hasto juga menilai dirinya mestinya didampingi oleh penasihat hukum. "Ada handphone yang disita. Dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya, karena segala sesuatunya harus berdasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi kuasa hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum," kata Hasto.

Hasto mengatakan dirinya memutuskan agar pemeriksaan atas dirinya dilanjutkan pada kesempatan lainnya.

"Kemudian akhirnya kami menyampaikan, ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, penasihat hukum Hasto, Patra M. Zen mengatakan penyitaan mesti dilakukan sesuai dengan prosedur.

"Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ajudan, lalu hadir dan langsung mengeledah, dan sekarang menyita, tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidik kan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan," kata Patra.

Ia turut menyinggung apapun proses penegakan hukum mesti sesuai dengan prosedur dan asas-asas keadilan.

Patra juga mempertanyakan kenapa penyidik tidak meminta langsung kepada Hasto. "Apakah ini yang kaitannya dengan satu wewenang yang sah begitu," kata dia.

Awak media lantas bertanya dalam kepentingan apa HP itu disita. "Ya itu tadi ya, jadi kami sampaikan. Yang namanya bentuk penyitaan itu tentu harus melalui prosedur, tentu harus melalui tata cara. Jadi ini HP-nya Pak Hasto, biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan," ujar Patra.

"Masa yang punya HP A, enggak dimintain dari yang langsung. Padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum, tapi dibeginikan. Apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan," sambung dia.

Pihak Hasto masih mempertimbangkan untuk mengajukan praperadilan atas penyitaan tersebut. "Nanti kita pikirkan," ujar Patra.

Sementara, Ronny Talapessy, kuasa hukum Hasto mengklaim kasus Harun Masiku kembali mencuat karena sikap PDIP yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi. Ronny mengklaim memiliki bukti soal pernyataannya itu.

"Kami mempunyai grafik, di mana Sekjen PDIP ketika sampaikan kritik dari proses Pilpres kemarin grafik naik, isu ini selalu dinaikkan," katanya.

Ronny menduga pelbagai isu yang menyeret kader PDIP akan terus muncul di tengah-tengah kondisi politik saat ini. "Kami menduga ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan terus," ujarnya.

KPK Klaim Sudah Sesuai SOP

Terpisah, KPK mengatakan pada momen itu pihaknya memberikan waktu kepada Hasto untuk membaca hasil berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya.

"Terkait pernyataan saksi yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengoreksi BAP yang disodorkan oleh penyidik," kata Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).

Budi mengatakan KPK tidak sengaja meninggalkan Hasto

sendirian di ruang pemeriksaan. Penyidik, kata Budi, juga kembali ke ruang pemeriksaan setelah Hasto selesai membaca hasil BAP-nya.

"Penyidik memberikan kesempatan dan kebebasan saksi H untuk membaca BAP tersebut. Oleh karenanya, penyidik meninggalkan ruangan dan kemudian kembali lagi," jelas Budi.

Selain itu, KPK juga menegaskan penyitaan itu sebagai kewenangan penyidik. "Penyitaan handphone milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud," kata Budi.

Budi mengatakan pihaknya sempat bertanya keberadaan ponsel milik Hasto saat Sekjen PDIP itu diperiksa. Hasto lalu menjawab ponsel miliknya ada di salah satu stafnya.

"Penyidik meminta staf dari saksi H dipanggil dan setelah dipanggil, penyidik menyita barang bukti berupa elektronik (HP), catatan dan agenda milik saksi H," ujar Budi.

KPK mengatakan ponsel merupakan salah satu barang bukti elektronik dalam perkara korupsi. Berdasarkan dasar tersebut, kata Budi, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan.

KPK juga segera menjadwalkan pemanggilan lanjutan kepada Hasto. Namun, belum diketahui agenda pemeriksaan tersebut. "Penyidik akan mengagendakan pemeriksaan saksi H berikutnya," kata Budi. (wis,tro,ist,rls,ant/dya)

KRONOLOGI KASUS HARUN MASIKU

Lanjutan dari hal 1...

*** 8 JANUARI 2020**

- Pagi Wahyu meminta uang kepada Agustiani.

- 12.55 Tim KPK menangkap Wahyu dan Rahmat Tonidaya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.

- 13.14 Tim lain menangkap Agustiani di rumahnya di Depok, Jawa Barat, bersama uang dolar Singapura senilai Rp 400 juta dan buku rekening.

- 13.26 hingga malam KPK berusaha menjemput Hasto Kristiyanto di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan. Tapi tim pulang dengan tangan hampa setelah sempat ditahan sejumlah polisi di lingkungan PTIK hingga menjelang subuh.

*** 6 JANUARI 2020**

- Rapat pleno KPU kembali menolak permintaan PDI Perjuangan yang ingin mengganti Riezky dengan Harun.
- Wahyu menghubungi Donny Tri Istiqomah dan berjanji mengusahakan kembali proses pergantian antarwaktu untuk Harun.

*** 27 DESEMBER 2019**
Wahyu meminta Agustiani Tio menyimpan dulu uang tersebut.

*** 26 DESEMBER 2019**
Agustiani Tio menerima Rp 450 juta dari Saeful.

*** 23 DESEMBER 2019**
Harun Masiku menyerahkan Rp 850 juta kepada Riri, anggota staf di kantor PDIP, di sebuah rumah di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A, Jakarta, yang merupakan kantor Hasto Kristiyanto, lalu diteruskan kepada Saeful.

*** 18 DESEMBER 2019**
KPU menerima surat dari PDIP yang bernomor 224/EX/DPP/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa MA lengkap dengan lampiran fatwa MA. Dalam surat ini, PDIP memohon kepada KPU untuk melaksanakan pergantian antarwaktu Riezky Aprilia kepada Harun Masiku. Surat ini ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

*** 17 DESEMBER 2019**
Kepada Agustiani Tio, Saeful menyerahkan Rp 200 juta dalam bentuk dolar Singapura. Wahyu menerima Rp 150 juta dalam bentuk dolar Singapura yang diantarkan Agustiani di pusat belanja Pejaten Village, Jakarta Selatan.

*** 16 DESEMBER 2019**
Saeful diduga melapor kepada Hasto Kristiyanto soal rencana pemberian uang Rp 400 juta kepada Wahyu Setiawan.

*** 1 OKTOBER 2019**
Pelantikan anggota DPR periode 2019-2024, salah satunya Riezky Aprilia.

*** 27 SEPTEMBER 2019**
KPU menerima tembusan surat PDIP nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal permohonan fatwa kepada MA. Surat ditandatangani Yasonna Laoly dan Hasto Kristiyanto.

*** 23-30 SEPTEMBER 2019**
- Saeful Bahri melobi Agustiani Tio Fidelina untuk menggubulkan permohonan PDIP agar KPU menetapkan Harun Masiku, bukan Riezky Aprilia.
- Agustiani menyerahkan surat berisi penetapan calon legislator dan fatwa MA dari Saeful kepada Wahyu Setiawan untuk membantu penetapan Harun sebagai calon anggota DPR terpilih.
- Wahyu menyanggupi dan meminta dana operasional Rp 900 juta.

*** 23 September 2019**
PDIP mengirim surat berisi penetapan calon legislator.

*** 13 SEPTEMBER 2019**
PDIP meminta fatwa kepada MA agar KPU melaksanakan putusan MA soal penetapan suara calon legislator.

*** 31 AGUSTUS 2019**
Rapat pleno KPU menolak permintaan PDI Perjuangan, lalu menetapkan Riezky Aprilia sebagai peraih suara terbanyak kedua sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

*** 5 AGUSTUS 2019**
PDIP mengirim surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tentang putusan MA, meminta suara Nazarudin Kiemas yang meninggal sebelum pencoblosan dialihkan ke Harun Masiku. Surat ditandatangani Bambang Dwi Hartono dan Hasto Kristiyanto.

Tanda Tanya saat Upacara HUT RI Diadakan di 2 Lokasi: IKN dan Jakarta

JAKARTA - Pemerintah memutuskan, upacara kemerdekaan HUT RI Ke - 79 bakal diselenggarakan di dua tempat. Tidak hanya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, tapi juga di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, usai Rapat Terbatas terkait HUT Ke - 79 RI bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Senin (10/6/2024).

"Iya sebagian di IKN sebagian di sini (Istana Merdeka)," kata Muhadjir kepada wartawan.

Muhadjir Effendy enggan menjelaskan alasan upacara digelar di dua tempat. "Gitu saja kok tanya alasan?" kata Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan nantinya skema yang dilakukan dalam penyelenggaraan upacara, nantinya Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara di IKN. Di IKN nantinya juga akan dihadiri presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sedangkan upacara di Istana Negara, Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, yang akan dihadiri pula wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Nanti pak wapres didampingi



Presiden Joko Widodo saat meninjau kesiapan lapangan upacara yang akan digunakan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024). (Dok)

wapres terpilih, presiden akan didampingi presiden terpilih," kata Muhadjir.

Nantinya di kedua tempat akan diselenggarakan kirab atau iring-iringan membawa bendera merah putih, begitu juga acara penampilan untuk acara hiburan.

Untuk diketahui, dalam rapat yang dimulai pukul 9.30 WIB itu, tidak hanya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pembangunan Muhadjir Effendy rapat itu dihadiri juga Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono. Ada juga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti rencana gelaran upacara kemerdekaan RI yang sampai diadakan serentak di dua lokasi. Mardani menerangkan semestinya di hari ulang tahun Indonesia, pemerintah bisa fokus kepada substansi.

"Mestinya fokus substansi. Upacara memang penting. Pangung

bagi pemerintah, tetapi selama ini yang dikenang lagunya, gaya, dan suasananya," ucap Mardani.

Mardani menegaskan seharusnya pemerintah masuk ke dalam substansi seperti membangun karakter, produktivitas hingga membangun ikatan kebangsaan.

"Dan itu tidak harus menghabiskan anggaran dan sibuk dengan asesoris," tegas Mardani.

"Jika (upacara di IKN dan Istana Jakarta) terjadi ya ini terjadi pemborosan anggaran," tambahnya.

Mardani juga menyebut dengan digelar upacara di dua lokasi menandakan IKN sebetulnya belum siap dan dipaksakan untuk menggelar upacara. "Iya, ini IKN seakan dipaksakan belum siap," tandasnya.

Minta Penambahan Anggaran Rp29,8 T

Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan usulan penambahan anggaran untuk pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp29,8 triliun saat rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2024)

Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan penambahan anggaran untuk tahun 2025 itu diusulkan sebagai konsekuensi atas tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN.

"Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp29,8 triliun," kata Raja Juli saat pemaparan pembahasan anggaran.

Usulan penambahan anggaran itu meningkat drastis dibanding pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp285,9 miliar dan tahun 2024 naik menjadi Rp543,3 miliar. Sedangkan pada pagu indikatif tahun 2025, angka itu menurun menjadi Rp505,5 miliar.

Menurut Raja Juli, penurunan itu karena rancangan anggaran yang masih berupa baseline, yang berasal dari kebutuhan dan realisasi berdasarkan pagu anggaran 2023-2024.

Untuk itu, pihak Otorita IKN telah mengajukan penambahan anggaran itu untuk tahun 2025 dengan menggelar pertemuan bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

"Upaya ini kami laksanakan dengan terus melaksanakan program dengan terukur dan evaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas efisiensi dalam pelaksanaan program," kata Raja Juli.

Kendati begitu, tambahnya, usulan penambahan anggaran puluhan triliun itu disampaikan untuk menjadi bahan diskusi. Namun, usulan itu merupakan kebutuhan yang nyata karena Otorita IKN nantinya mempunyai tanggung jawab mengelola barang milik negara dengan baik. (tro,ant,wid/dya)

RENCANA ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR UNTUK PEMBANGUNAN IKN 2024 BERDASARKAN SEKTOR KERJA (APRIL 2024)

Bina Marga

16,67

Cipta Karya

11,44

Perumahan

5,75

Sumber Daya Air

1,58

(Triliun Rupiah)

4.3 Triliun

Total realisasi anggaran

REALISASI ANGGARAN IKN BERDASARKAN KLASTER (1 APRIL 2024) (RUPIAH) (DATABOKS)

2.3 Triliun

Klaster

2.0 Triliun

Klaster non-infrastruktur